

**PROYEKSI PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER
TAHUN 2002**

SKRIPSI



Ass :	Hadiah	Kelas
Terima di: 13 JUL 2002		336.24
Oleh: No. Induk: 1184		2AE
KLASIR / PENYALIN: 3FS		P

Nur Oktarina Zaenab

970810101074

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

JUDUL SKRIPSI

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI WILAYAH
KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER TAHUN 2002

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : NUR OKTARINA ZAENAB

N. I. M. : 970810101074

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

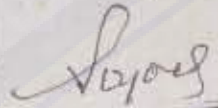
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

15 Juni 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

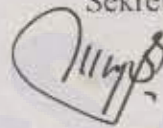
Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Soejoedi, SU
NIP. 130 519 777

Sekretaris,



Dra. Nanik Istiyani, MSi
NIP. 131 658 376

Anggota,



Drs. Bambang Yudono, MM
NIP. 130 676 291



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

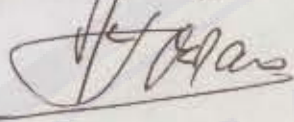


Drs. H. Liakip, SU
NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

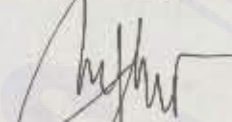
Judul Skripsi : Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah
Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember
Nama : Nur Oktarina Zaenab
NIM : 970810101074
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



Drs. Bambang Yudono, MM
NIP.130 355 409

Pembimbing II



Dra. Anifatul Hanim
NIP. 131/953 240

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Juni 2002

KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ~ Ayahanda Almarhum Rachmad Kusuma yang banyak memberikan doa, nasehat petuah dan bimbingan yang sangat berguna sewaktu beliau masih hidup dan Ibunda tercinta Sitti Hasanijah yang selalu memberikan do'a serta bimbingan moril yang tiada henti-hentinya sehingga karya kecil ini bisa terselesaikan;
- ~ Kakak-kakakku Eko, Fadjar, Tutuk, Ayik, Uus, serta adikku Wawan;
- ~ Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember

MOTTO

Bacalah Al - Qur'an karena ia akan datang pada hari qiyamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya (Sabda Rasulullah SAW, MUSLIM)

Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga (Sabda Rasulullah SAW, MUSLIM)

Tuhan, selama ini aku hanya berdoa agar Engkau memberi aku rahmat agar bisa mengubah semua orang yang berhubungan denganku. Tapi kini satu-satunya do'aku adalah berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka aku tidak begitu menyia-nyiakan hidupku (Bayazid Bisthami)

ABSTRAKSI

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang berbeda dengan penerimaan-penerimaan pajak lainnya, karena pajak penghasilan mempunyai efek kontraksi yang langsung pada masyarakat sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember selama ini sudah melebihi target yang ditentukan, namun ekstensifikasi dan intensifikasi pajak penghasilan harus selalu dilakukan agar prospek penerimaan pajak penghasilan meningkat di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak penghasilan tahun 1992 - 2001 dan prospek penerimaan pajak penghasilan tahun 2002. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Double Exponential Smoothing*, dengan konstanta smoothing sebesar 0,5. Hasil analisis data dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan penerimaan pajak penghasilan dari tahun 1992 - 2001 mengalami peningkatan dan prospek penerimaan pajak penghasilan tahun 2002 meningkat.

Kata kunci : forecast, pajak penghasilan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Proyeksi Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember Tahun 2002". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji perkembangan penerimaan pajak penghasilan tahun 1992 - 2001, serta prospek penerimaannya tahun 2002.

Proses penulisan skripsi ini melibat bantuan dari banyak pihak, untuk itu kami tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas bantuan moril, spirituil maupun materiil, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Yudono, MM dan Ibu Dra. Anifatul Hanim, selaku dosen pembimbing yang telah bersabar hati membimbing dan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Drs. H. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Aminah, MM dan Bapak Sunlip Wibisono, M.Kes, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan IESP Fakultas Ekonomi;
4. Bapak Drs. Soejoedi, SU, yang telah membantu menyempurnakan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang membantu kelancaran penelitian;
6. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember beserta staf, atas perkenannya untuk dapat memperoleh data-data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini;

7. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember beserta staf, khususnya Bapak Rudi, atas ijin dan bantuan untuk dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
8. Keluarga besar Bapak H.R. Zainul Arifin, SH yang telah turut membantu penyelesaian skripsi ini;
9. Sahabat seiatiku, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
10. Teman-teman Ekspor '97, atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama ini;
11. Sahabatku Yuki, atas kebersamaan dan persahabatan dari SD - sekarang semoga akan terus berlanjut selamanya, teman-teman seperjuangan yang lulus lebih dulu Ice S.E, Erfan S.E, dan penasehat pribadiku Yucky-2;

Kami sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharap kritik dan pendapat yang bersifat membangun dan membimbing menuju kesempurnaan. Kami ucapkan terima kasih dan dengan suatu penghargaan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi yang berkenan.

Jember, Juni 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR Lampiran.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	5
2.2 Landasan Teori	5
2.3 Hipotesis	11
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	12
3.2 Metode Pengambilan Data	12
3.3 Metode Analisis Data	12
3.4 Definisi Variabel Operasional	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	14
4.1.1 Kondisi Geografis di Wilayah Kerja KPP Jember.....	14

4.1.2 Kondisi Ekonomi di Wilayah Kerja KPP Jember.....	14
4.1.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak di KPP Jember.....	16
4.1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Jember	18
4.2 Analisis Data	20
4.3 Pembahasan	21
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1992 - 2001 (juta rupiah) dan Pertumbuhannya (%).....	15
Tabel 2	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan Jumlah Wajib Pajak di KPP Jember Tahun 1992 - 2001.....	18
Tabel 3	Hasil Perhitungan Realisasi, Target dan Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 1992 - 2001.....	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Trend PDRB di Wilayah Kerja KPP Jember Tahun 1992-2001.....	16
Grafik 2	Trend Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah Kerja KPP Jember Tahun 1992 - 2001.....	19
Grafik 3	Penerimaan dan Estimasi Pajak Penghasilan Tahun 1992 - 2001.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Metode Double Exponential Smoothing untuk $\alpha = 0,2$
2. Perhitungan Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Metode Double Exponential Smoothing untuk $\alpha = 0,5$
3. Perhitungan Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Metode Double Exponential Smoothing untuk $\alpha = 0,9$
4. Perhitungan Trend Pajak Penghasilan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember Tahun 1992 - 2001
5. Perhitungan Trend PDRB Kabupaten Jember Tahun 1992 - 2001
6. Perhitungan Trend PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 1992 - 2001



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan, sehingga perlu adanya pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak telah dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian dalam menghimpun dana dan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri yang mahal, sehingga diharapkan bantuan luar negeri semakin lama semakin kecil peranannya (Subekti, 1996:1015).

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan pajak secara potensial masih memungkinkan. Sejak tahun 1983 pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi pajak atau pembaharuan perpajakan mulai dilakukan sejak tanggal 11 Januari 1984, bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang yang telah banyak mengalami perubahan hingga tahun 2000. Berbagai perubahan undang-undang perpajakan itu adalah perubahan UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan UU No. 9/1994, dan disempurnakan lagi dengan UU No. 16/2000. Termasuk perubahan undang-undang untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (Suandy, 2000:80).

Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak selama ini ditempuh melalui dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi dimaksudkan untuk menjaring lebih banyak wajib pajak yang dapat dilakukan melalui perbaikan sistem perpajakan. Intensifikasi merupakan usaha penyempurnaan sistem perpajakan, peningkatan efisiensi administrasi, serta pembenahan aparatur perpajakan agar makin mampu, tertib dan efektif. Mulai tahun 1983 serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menerapkan sistem *self assesment*, menggantikan sistem lama *custom assesment*. Melalui sistem *self assesment* ini masyarakat dituntut aktif dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung dan menetapkan sendiri beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan kemampuannya (Soemitro, 1991:5).

Pajak penghasilan merupakan salah satu dari jenis pajak yang terus ditingkatkan penerimaannya. Menurut Sjahrir (1994:49), pajak penghasilan berbeda dengan penerimaan-penerimaan pajak lainnya, karena pajak penghasilan mempunyai efek kontraksi yang langsung, yang dirasakan individu-individu yang harus menulis surat pemberitahuan (SPT) pajak pribadi, maupun perusahaan-perusahaan yang membuat laporan pajak. Usaha pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui perubahan undang-undang perpajakan (*tax reform*) cenderung dilakukan dengan menurunkan tarif pajak penghasilan dan perluasan obyek pajak, dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir dibebani kewajiban pajak yang lebih berat. Hal ini tentunya dapat mengurangi terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak (*loopholes*) (Baridwan, 1996:36).

Target penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan, berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam kaitan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni persepsi masyarakat, ketersediaan perangkat dan perundang-undangan, serta kemampuan administrasi perpajakan (Baridwan, 1996:4).

Beberapa sebab yang menjadikan kendala tidak tercapainya target penerimaan pajak penghasilan yaitu lemahnya aparat pajak dan rendahnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, disamping itu profil basis pajak di Indonesia yang kurang mendukung pemungutan pajak yang efektif. Salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan adalah dari masyarakat yang bekerja. Kebanyakan sektor informal merupakan tumpuan dari sebagian besar masyarakat yang bekerja. Pemungutan pajak di sektor informal merupakan suatu kesulitan sendiri, karena sektor ini kurang mapan baik dari segi usaha maupun administrasi pembukuannya. Akibatnya aparat perpajakan kesulitan untuk mencari dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan, walaupun sebenarnya mereka berpotensi untuk dikenakan pajak (Soemarso, 1988:321)

Kantor Pelayanan Pajak Jember menghimpun penerimaan pajak penghasilan untuk dua wilayah, yaitu Kabupaten Jember dan Bondowoso. Realisasi penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Jember cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan akan terus ditingkatkan penerimaannya untuk tahun-tahun mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahannya adalah bagaimana perkembangan penerimaan pajak penghasilan dan proyeksi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 2002?

1.3 Tujuan dan Manfaat dan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak penghasilan tahun 1992-2001 serta proyeksi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 2002.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak;
2. sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan membahas masalah yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pajak penghasilan pernah dilakukan oleh Adityawati (1996) dengan judul Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah wajib pajak, dan kebijaksanaan reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil empiris penelitian menyatakan hanya variabel jumlah wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, hal ini disebabkan karena data wajib pajak menggunakan data tenaga kerja, karena angkatan kerja dianggap sebagai penduduk yang berpotensi dikenakan pajak penghasilan.

Perbedaannya dengan penelitian ini, tidak menganalisis tentang variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, tetapi menganalisis tentang proyeksi penerimaan pajak penghasilan beberapa tahun mendatang.

2.2 Landasan Teori

Pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber penerimaan yang terus ditingkatkan karena penerimaan pajak tidak fluktuatif dan tidak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan (*uncontrolable*), dan sulit diperkirakan realitasnya (Abdulgani, 1996). Pajak dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masuk dalam pos penerimaan rutin yang digolongkan menjadi penerimaan pajak langsung dan penerimaan pajak tak langsung. Pajak semakin memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Peranan ekspor migas tidak dapat lagi diandalkan karena adanya bahan pengganti migas dan juga menipisnya sumber migas di

Indonesia. Demikian pula sumber pembiayaan dari bantuan luar negeri yang dikenal dengan penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek (Harefa, 1993:21).

Pengenaan pajak berhubungan erat dengan mentalitas suatu bangsa, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak secara drastis tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, namun merupakan proses perombakan struktural yang memerlukan waktu relatif panjang. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak akan banyak tergantung pada jenis pajak yang bersangkutan. Adapun jenis pajak yang masih bisa ditingkatkan dengan struktur tarif dan basis yang ditetapkan, yaitu pajak langsung (Nurdjaman, 1993:24).

Pengertian pajak banyak dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Munawir, 1990:3). Menurutny dari definisi tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : (a) pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak diperuntuk bagi pembayaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai "*public investment*", sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair); (d) pajak dipungut

disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dan pendanaan pembangunan, menurut Wagner (Goedhart, 1982:36) digolongkan menjadi pajak langsung yang terdiri dari pajak pendapatan dan pajak atas kekayaan, serta pajak tak langsung yang terdiri atas transaksi dan pajak atas konsumsi. Dalam hukum perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, pajak langsung terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pajak tak langsung antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Teori yang memberikan dasar pembenaran mengenai pemungutan pajak dari negara kepada rakyatnya untuk menjalankan pembangunan bagi kepentingan bersama, yaitu: (a) teori asuransi, mengatakan bahwa tugas negara untuk melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya diperlukan pembayaran premi; (b) teori kepentingan, bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan pada kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah; (c) teori gaya pikul, mengatakan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya; (d) teori bakti, mengatakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan dalam bidang pajak (Suandy, 2000:12).

Pengenaan pajak menurut Suparmoko (1993:93) harus didasarkan pada beberapa prinsip pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan *Smith Cannons*, yaitu: (a) prinsip keadilan, pengenaan pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari masing-masing wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak; (b) prinsip kepastian, pajak hendaknya tegas, jelas,

dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri; (c) prinsip kecocokan, pengenaan pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak; (d) prinsip ekonomi, pemungutan pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung, dimana beban pajak yang bersangkutan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan diklasifikasikan sebagai pajak subyektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (Mardiasmo, 1996:6). Pembebanan pajak penghasilan didasarkan pada penghasilan dalam arti luas, yang mencakup penghasilan dari aktifitas utama maupun aktifitas tambahan. Pajak penghasilan juga ditujukan kepada laba perusahaan yang dapat dikenakan pajak (Mangkoesoebroto, 1994:203).

Struktur pajak penghasilan dirancang progresif, artinya semakin tinggi pendapatan seseorang semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan. Pajak penghasilan dianggap paling mendekati ukuran keadilan (*azas equality*), karena pajak tersebut lebih mencerminkan keadilan dan menjamin pemerataan dibanding pajak-pajak lainnya. Penghasilan dianggap sebagai satu-satunya ukuran yang terbaik dari kemampuan ekonomis atau dari kesanggupan membayar pajak (Musgrave dan Musgrave, 1993:230).

Menurut Rahardjo (1985:21), sumber-sumber pajak yang banyak memberikan kontribusinya pada penerimaan negara di negara sedang berkembang adalah pajak tak langsung, karena di negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum banyak golongan menengah atau golongan kaya yang dilahirkan oleh perkembangan ekonomi. Sedangkan

Goode (Mangkoesoebroto, 1994:56) menyatakan bahwa untuk negara sedang berkembang orang yang membayar pajak pendapatan hanyalah mereka yang masuk dalam kelompok 20% terkaya di negara. Pajak pendapatan sebagian besar dikenakan terhadap karyawan dan orang-orang yang berada dalam strata pendapatan tertinggi. Upaya menaikkan PPh, menurut Goode (Mangkoesoebroto, 1994:104) akan menghadapi beberapa kendala tertentu antara lain adalah tingkat pendidikan yang cukup, serta kepatuhan membayar pajak yang tinggi.

Pada prinsipnya pemungutan pajak langsung diharapkan lebih besar dari pajak tidak langsung. Hal ini dikarenakan beban pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak, sehingga pajak benar-benar dipungut dan dibayar oleh mereka yang mampu atau menurut undang-undang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak (Zandjani, 1988:343). Untuk negara-negara berkembang peningkatan pendapatan dana lebih mengandalkan pada pajak tidak langsung, tetapi mengingat bahwa pada pajak tidak langsung pada akhirnya pihak konsumen yang akan membayar pajak, dikhawatirkan orang yang berpendapatan tinggi justru beban pajaknya ringan. Oleh karena itu peran pajak langsung seharusnya lebih dapat ditingkatkan, dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada potensi terselubung dalam penerimaan pajak penghasilan (Zandjani, 1988:344).

Menurut Brotodihardjo (Munawir, 1990:7), banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak (khususnya pajak langsung) yang mengakibatkan potensi penerimaan PPh belum banyak terjaring. Hambatan tersebut berupa perlawanan terhadap pajak yang dibedakan antara perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Dalam perlawanan pasif tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka tidak

membayar pajak. Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak maupun usaha melalaikan pajak (Munawir, 1990:7).

Pajak, sebagai sumber penerimaan negara terus dioptimalkan penerimaannya untuk masa-masa yang akan datang, tidak saja bagi pembiayaan aktivitas pemerintah, namun juga untuk membayar bunga dan cicilan hutang. Apalagi penerimaan migas sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penerimaan pemerintah karena tingginya ketidakpastian harga di pasar internasional. Khususnya untuk pajak penghasilan yang menjadi pusat perhatian karena efek redistribusinya (Mangkoesebroto, 1993:158).

Goode (Mangkoesebroto, 1993:146) mengungkapkan bahwa sistem pajak pendapatan akan dapat menjadi sumber utama penerimaan negara, apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut : (a) penggunaan uang atau adanya sistem pasar yang luas dalam suatu perekonomian; (b) tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi; (c) adanya sistem akuntansi yang jujur dan dapat dipercaya; (d) tingkat kepatuhan membayar pajak yang tinggi; (e) aparaturnya yang jujur dan cukup efisien.

Menurut Zandjani (1993:30) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak yaitu, (a) tingkat pendapatan perkapita masyarakat; (b) perangkat undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan; (c) masyarakat, khususnya wajib pajak meliputi jumlah, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan, serta kepatuhan dan kesadarannya dalam perpajakan. Soemarso (1998:316) mengemukakan bahwa pertumbuhan pajak juga dipengaruhi oleh : (a) tingkat

pembangunan (*level of development*), (b) tingkat keterbukaan (*degree of openness*) dan (c) struktur perekonomian (komposisi sektoral dari pendapatan nasional).

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dalam jangka pendek, adalah dengan cara memperbanyak jumlah orang yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui intensifikasi perpajakan. Disamping itu juga harus dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan moralitas aparat pajak.

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang timbul berdasarkan latar belakang dan landasan teori, diduga bahwa perkembangan penerimaan pajak penghasilan dan prospek penerimaan pajak penghasilan tahun 2002 mengalami peningkatan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menghasilkan suatu generalisasi dari realita yang berkembang melalui suatu metode perkiraan atau estimasi. Metode estimasi dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkungannya (Sumanto, 1995:12).

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan pertimbangan bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Jember cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2 Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data yang tersedia pada instansi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jember, Kantor Statistik Jember. Rentang waktu penelitian dimulai tahun 1992 dengan alasan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 1992 wilayah kerjanya dipersempit hanya untuk Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Untuk mengestimasi penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang, digunakan data beberapa tahun sebelumnya.

3.3 Metode Analisa Data

Forecasting atau proyeksi adalah peramalan (perkiraan) mengenai segala sesuatu yang belum terjadi. *Forecasting* diperlukan untuk mengembangkan estimasi atau perkiraan yang akurat di masa depan untuk proses perencanaan (Subagyo, 1991:2).

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan dan perkiraan penerimaan pajak penghasilan dapat diketahui dengan menggunakan rumus analisis *forecast* metode *double exponential smoothing* (Subagyo, 1991 : 24) :

Proses *Smoothing* :

$$S'_t = \alpha X_t + (1-\alpha) S_{t-1}$$

$$S''_t = \alpha S'_t + (1-\alpha) S'_{t-1}$$

Forecast :

$$S_{t+m} = a_t + b_{tm}$$

Keterangan :

S = *forecast*;

X = jumlah penerimaan pajak penghasilan (dalam rupiah);

t = periode dalam tahun;

α = konstanta *smoothing*;

b = slope;

m = jangka waktu forecast ke depan

untuk mendapatkan nilai forecast yang paling tepat dilakukan secara *trial and error* untuk $\alpha = 0,2$; $\alpha = 0,5$; dan $\alpha = 0,9$.

3.4 Definisi Variabel Operasional

1. Proyeksi penerimaan pajak penghasilan adalah gambaran atau perkiraan ramalan penerimaan pajak penghasilan pada masa yang akan datang;
2. Perkembangan adalah suatu keadaan yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang, serta terjadinya perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang;
3. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Geografis di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember terdiri dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Bondowoso. Kabupaten Jember dengan luas 3.293,34 km² terletak pada posisi 6°27'9" - 7°14'33" Bujur Timur dan 7°59'6" - 8°33'56" Lintang Selatan. Batas-batas administrasi Kabupaten Jember sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.162.688 jiwa (BPS, 2001:5).

Luas Kabupaten Bondowoso lebih sempit dari Kabupaten Jember, yaitu 1.560,10 km². Terletak pada posisi 7°50'10" - 7°56'41" Lintang Selatan dan 113°48'10" - 113°48'26" Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten Bondowoso, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 663.511 jiwa (BPS, 2001:7).

4.1.2 Kondisi Ekonomi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember

Keadaan perekonomian secara keseluruhan tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah dari seluruh nilai produksi seluruh lapangan usaha di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 1 PDRB Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1992-2000 (juta rupiah) dan Pertumbuhannya (%)

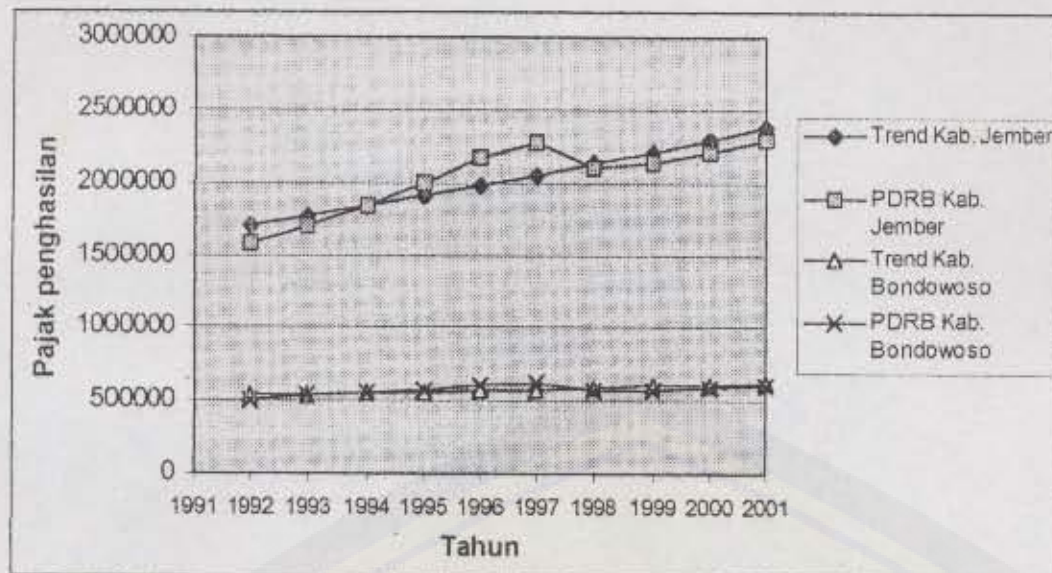
Tahun	PDRB		PDRB	
	Kabupaten Jember	% Pertumbuhan	Kabupaten Bondowoso	% Pertumbuhan
1992	1.569.413,468	-	499.429,54	-
1993	1.696.849,842	8.12	529.949,25	5.31
1994	1.838.604,18	8.35	550.162,65	4.6
1995	1.996.704,71	8.6	575.040,67	4.52
1996	2.170.699,24	8.71	611.300,58	12.2
1997	2.269.330,52	4.5	629.933,38	3.05
1998	2.097.376,00	-7.5	569.646	-9.57
1999	2.136.985,25	1.9	578.025	1.47
2000	2.208.057,36	3.32	594.787,73	2.9
2001	2.285.212,91	3.49	613.261,43	3.1

Sumber: Kantor Statistik Jember, 2001

Perkembangan PDRB di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 1992 - 2001 dianalisis dengan menggunakan trend linier eksponensial menghasilkan persamaan berikut :

$$\text{Log Y (Jember)} = 6.303709508 + 0.00811886 X$$

$$\text{Log Y (Bondowoso)} = 5.75880069 + 0.003822647 X$$



Grafik 1. Trend PDRB wilayah kerja KPP Jember Tahun 1992 - 2001

Grafik 1 menunjukkan bahwa PDRB di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember dari tahun 1992 - 2001 mempunyai trend yang positif, artinya PDRB di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan.

Kondisi geografis wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember bercorak agraris dan didominasi oleh sektor pertanian. Hampir separoh lebih sektor pertanian menyumbang bagi pembentukan nilai total PDRB, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, bangunan dan jasa.

Perkembangan PDRB di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember pada tahun 1998 terjadi penurunan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 berpengaruh pada pertumbuhan sektor ekonomi di setiap daerah.

4.1.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember

Pengelolaan pemungutan pajak di Kabupaten Jember dan Bondowoso dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jember di bawah

inspeksi Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak di Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK01/1989 tentang penyempurnaan organisasi Ditjen pajak, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1989 organisasi Ditjen Pajak Jawa Timur disempurnakan, yang semula hanya terdapat sembilan Kantor Inspeksi Pajak (KIP) menjadi lima belas dan namanya dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember yang semula merupakan wilayah eks-Karasidenan Besuki, yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso dipersempit lagi hanya meliputi Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyampaian informasi perpajakan;
- b. Melakukan tata usaha wajib pajak;
- c. Melakukan tata usaha dan cek SPT masa dan laporan pembayaran masa PPh, PPN, dan pajak tidak langsung lainnya;
- d. Melakukan tata usaha penarikan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi pajak;
- e. Melakukan verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 516/KMK01/92 pasal 297 tentang struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari tujuh seksi dan dua kelompok, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan Data dan Tata Usaha Perpajakan
3. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4. Seksi Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan
5. Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya
6. Seksi Penerimaan Keberatan

7. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak
8. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dengan membentuk tim ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, yang bertugas untuk mencari wajib pajak baru yang berpotensi untuk dikenakan pajak dan mendeteksi adanya kesalahan dalam perhitungan pembayaran pajak. Tim ekstensifikasi dan intensifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK01/1989 tentang penyempurnaan organisasi Ditjen Pajak, dibawah pengawasan Kantor Wilayah Pajak setempat, yang masa kerjanya 1 tahun dan diambil dari masing-masing seksi.

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember dibedakan menjadi dua macam, yaitu penerimaan pajak langsung (Pajak Penghasilan) dan pajak tak langsung (PPN, dan pajak tak langsung lainnya). Seluruh penerimaan pajak tersebut disetor pada pemerintah pusat dan dipergunakan sebagai salah satu penerimaan negara dan selanjutnya akan masuk dalam pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4.1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Jember

Penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Jember selama tahun 1992 - 2001 tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Jember dapat dilihat pada tabel 2.

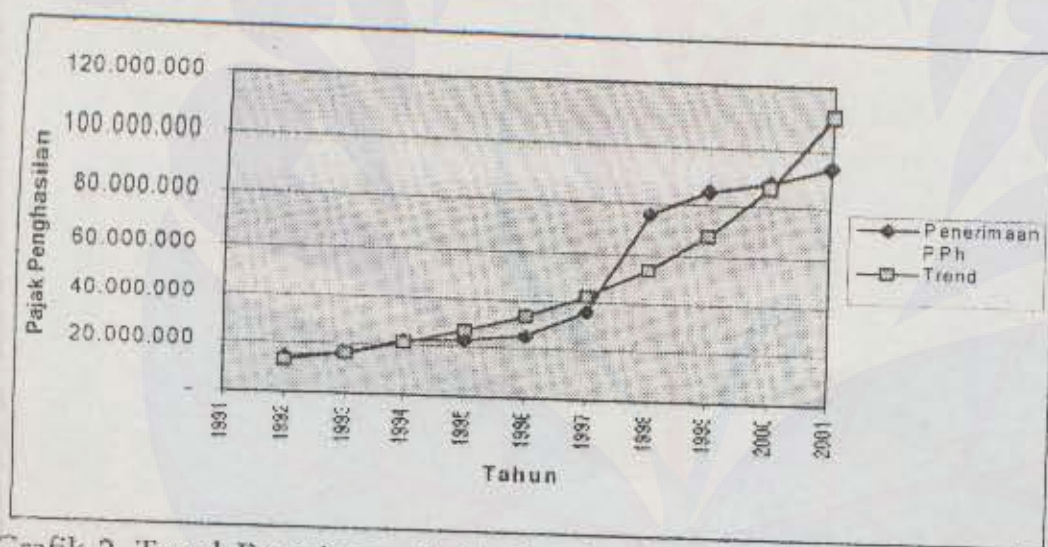
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan Jumlah Wajib Pajak di KPP Jember Tahun 1992 - 2001

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)	Jumlah wajib pajak
1992	14.707,639	-	15.081
1993	16.501,799	12.1	15.737
1994	21.716,430	31.6	16.904
1995	22.639,570	4.2	17.329
1996	25.351,000	11.9	17.847
1997	35.752,546	41.03	18.440
1998	76.042,221	112.69	19.104
1999	85.312,495	12	20.357
2000	87.981.167	3.1	21.415
2001	94.172.153	7.03	22.561

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Jember, 2001

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 1992 - 2001 dianalisis dengan menggunakan trend linier eksponensial menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = 7,576618089 + 0,051601558 X$$



Grafik 2. Trend Penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 1992 - 2001

Sumber : Tabel 2

Grafik 2 menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember pada tahun 1992 - 2001 mempunyai trend positif, artinya penerimaan pajak penghasilan rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan.

Tim ekstensifikasi dan intensifikasi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember dalam suatu periode selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan pencarian wajib pajak potensial yang masih belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga dalam tiap tahunnya selalu terjadi penambahan jumlah wajib pajak, terutama untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan tertinggi terjadi pada tahun 1998. Pajak penghasilan atas bunga deposito yang pada saat itu mencapai 60% memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak penghasilan.

4.2 Analisis Data

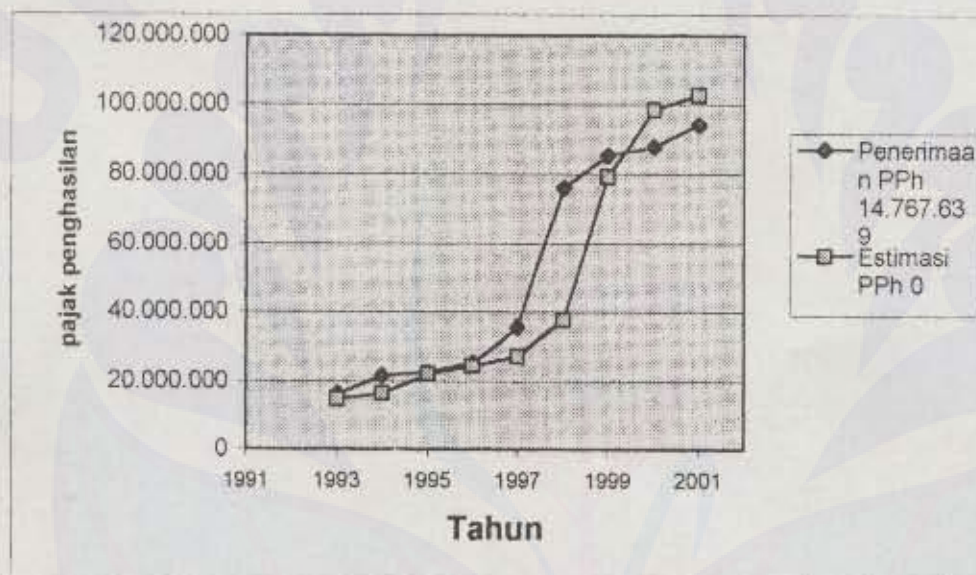
Pada bagian ini akan dikemukakan hasil empiris dari penelitian mengenai perkembangan dan proyeksi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember untuk tahun pengamatan 1992 - 2001. Metode yang dipakai untuk menganalisis perkembangan dan perkiraan penerimaan pajak penghasilan adalah metode *double exponential smoothing*. Hasil perhitungan perkembangan dan perkiraan penerimaan pajak penghasilan selama 10 tahun secara *trial and error* didapatkan forecast dengan $\alpha = 0,5$. Hal ini dibuktikan oleh *forecast error*nya, dimana *mean absolute error* dan *mean squared error*nya paling kecil.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Realisasi, Target dan Forecast Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 1992 - 2001

Periode (tahun)	Target Penerimaan PPh (2)	Penerimaan PPh (3)	Estimasi PPh (4)	Selisih (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)
1992		14.767.639	-	-
1993	13.577.000	16.501.799	14.767.639	1.734.160
1994	18.790.000	21.716.430	16.501.799	5.214.631
1995	22.707.000	22.639.570	22.149.970	489.600
1996	26.024.000	25.351.000	24.376.767,75	974.232,25
1997	27.328.000	35.752.546	27.210.597,75	8.541.948,25
1998	38.116.629	76.042.221	37.855.701,81	38.186.519,19
1999	81.917.100	85.312.495	79.280.863,87	6.031.631,13
2000	95.549.994,4	87.981.167	98.597.767,66	10.616.600,66
2001	100.792.455,3	94.172.153	102.774.347,4	8.602.194,4

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4 dapat digambarkan penerimaan PPh dengan perkiraan penerimaan PPh melalui perhitungan seperti pada grafik 4.



Grafik 3. Penerimaan dan Estimasi Pajak Penghasilan Tahun 1992-2001

Sumber : Lampiran 2

Proyeksi penerimaan pajak penghasilan tahun 2002 berdasarkan metode *double exponential smoothing* (lampiran 3):

$$\begin{aligned} S_{t+1} &= a_t + b_{tm} \\ &= 96.322.701,61 + 9.988.481,67 \\ &= 106.311.183,3 \end{aligned}$$

Target penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 2002 sebesar Rp. 100.792.455,3

4.3 Pembahasan

Berdasarkan metode *Double Exponential Smoothing*, diketahui bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak penghasilan tahun 1992 - 2001 lebih besar dari *forecast* penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berarti perkembangan penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,18%. Prospek penerimaan pajak penghasilan untuk tahun 2002 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 106.311.183.300. Menurut Zandjani (1993:347) peningkatan penerimaan pajak ditentukan oleh : (a) tingkat pendapatan perkapita masyarakat; (b) perangkat undang-undang perpajakan dan aturan pelaksanaan; (c) wajib pajak, meliputi jumlah, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan, serta kepatuhan dan kesadarannya dalam perpajakan. Prospek penerimaan pajak penghasilan secara tidak langsung akan meningkat seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB akan menyebabkan kenaikan jumlah barang dan jasa, penambahan kegiatan kerja dan meningkatkan jumlah tenaga kerja, sehingga jumlah wajib potensial secara tidak langsung akan semakin bertambah, kondisi tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebanyak tiga kali,

yaitu pada tahun 1983, tahun 1994, dan tahun 2000. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dengan adanya penyempurnaan kebijakan perpajakan pada tahun 1994 (*tax reform 94*) melalui penurunan tarif yang dilaksanakan pada awal Januari 1995 mengalami penurunan sebesar 4,2%. Hal ini disebabkan pelaksanaan reformasi perpajakan 94 baru pada tahap awal dan masih dilakukan penyesuaian untuk perhitungan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Menurut Gitosardjono (1995:18), penurunan tarif pajak penghasilan akan meningkatkan penerimaan negara jika diadakan ekstensifikasi pungutan pajak, dengan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang berpotensi untuk dikenakan pajak. Penurunan tarif pajak secara teoritis juga dapat mengurangi besarnya pendapatan yang tidak dilaporkan, sehingga penerimaan pajak akan meningkat (Mangkoesoebroto, 1993 :325).

Peningkatan pendapatan perkapita cenderung akan mendorong makin besarnya individu maupun unit usaha yang harus membayar pajak dengan tarif yang lebih besar (Anwar, 1992:59). Walaupun terjadi penurunan pendapatan perkapita masyarakat, realisasi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tetap mengalami peningkatan hingga mencapai 112,69%. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menetapkan suku bunga tinggi yang pesat. Akibatnya prosentase penerimaan pajak penghasilan dari bunga deposito melonjak pesat.

Penyempurnaan sistem perpajakan tahun 2000 (*tax reform 2000*) mulai diberlakukan pada tahun 2001, dengan adanya kenaikan tarif pada pendapatan kena pajak. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menerima ketentuan baru dengan adanya kenaikan tarif, dan pihak fiskus masih memberikan toleransinya dengan memberikan keleluasaan pada sebagian wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan ketentuan yang lama.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang paling besar peluangnya bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, karena pajak penghasilan mempunyai efek kontraksi langsung yang harus dirasakan individu-individu yang harus menulis surat pemberitahuan pajak pribadi, maupun perusahaan-perusahaan yang membuat laporan pajak (Sjahrir, 1994:49). Menurut Soemarso (1995:37) penyelundupan pajak/kepatuhan seseorang membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tarif pajak, probabilitas dapat diketahui adanya pendapatan yang tidak dilaporkan dan hukuman/denda yang dikenakan. Disamping itu, masalah dalam pemungutan pajak penghasilan menurut Zandjani (1988:343) bahwa anggota masyarakat yang memenuhi kriteria undang-undang tidak dapat dijangkau dan diketahui oleh aparat pajak serta mengidentifikasikannya yang tidak mudah terutama untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Rata - rata realisasi penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember lebih tinggi dari target yang ditentukan oleh aparat perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Jember. Target penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 1993 - 2001 lebih besar daripada *forecast* penerimaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Double Exponential Smoothing*, sedangkan target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jember tahun 2002 lebih kecil dari *forecast* penerimaan pajak penghasilan tahun 2002 berdasarkan metode *Double Exponential Double Smoothing*. Target penerimaan pajak di KPP Jember dihitung berdasarkan rumus : Target penerimaan pajak = $T_{t-1} + (T_{t-1} \times gT_t)$, dimana T_{t-1} = penerimaan pajak tahun sebelumnya, gT_t = pertumbuhan pajak tahun sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hipotesis dan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pajak penghasilan dari tahun 1992 - 2001 dan prospek penerimaan pajak penghasilan tahun 2002 mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Target penerimaan pajak perlu dilakukan berdasarkan *forecast* penerimaan pajak agar dapat diperoleh hasil yang mendekati kenyataan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, Nurdjaman dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Intermedia. Jakarta
- Adityawati, Pramita. 1996. *Analisis Perkembangan Pajak Penghasilan di Indonesia*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Airlangga. Surabaya
- Baridwan, Zaki. 1996. Dampak Tax Reform Terhadap Wajib Pajak. *Lintasan Ekonomi*. Edisi Desember
- BPS. 2001. *Jember Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik
- . 2001. *Bondowoso Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik
- Goedhart, Dr, C. 1982. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Terjemahan
- Harefa, Mandala. 1993. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak dalam Pendanaan APBN. *Pelita*. Edisi XX
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Kebijaksanaan Ekonomi Publik Subtansi dan Urgensi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta
- Munawir, S. 1990. *Perpajakan*. Liberty. Yogyakarta
- Musgrave dan Musgrave. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta
- Rahardjo, Dawam. 1985. Evolusi Struktur Pajak dan Proses Demokratisasi. *Prisma*. Edisi IV/XIV
- Sjahrir. 1994. *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
- Soemarso. 1988. *Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Perluasan dan Pengektifan Basis Pajak*. UI Press. Jakarta
- . 1998. Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Volume XLVI No.3

- Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan II*. Eresco. Bandung
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Subagyo, Pangestu. 1991. *Forecasting Konsep dan Aplikasi*. BPFE. Yogyakarta
- Subekti, Imam. 1996. Reformasi Perpajakan (Tax Reform), Suatu Gagasan. *Lintasan Ekonomi*. Edisi April
- Sumanto, Drs, M.A. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset. Yogyakarta
- Suparmoko. 1996. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE. Yogyakarta
- Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. 1988. *Prospek Permasalahan Pajak dalam Tahun Anggaran 1988/1989*. UI Press. Jakarta
- . 1992. *Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Lampiran 4. Perhitungan Trend Pajak Penghasilan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember Tahun 1992 - 2001

Tahun	Y	Log Y	x	X log Y	X ²
1992	14.767.639	7.169311067	-9	-64.5237996	81
1993	16.501.799	7.217531293	-7	-50.52271905	49
1994	21.716.430	7.336788432	-5	-36.68394216	25
1995	22.639.570	7.354868174	-3	-22.06460452	9
1996	25.351.000	7.403995095	-1	-7.403995095	1
1997	35.752.546	7.553306974	1	7.553306974	1
1998	76.042.221	7.881054793	3	23.64317243	9
1999	85.312.495	7.931012643	5	39.65506321	25
2000	87.981.167	7.944389917	7	55.61072941	49
2001	94.172.153	7.9739225	9	71.7653025	81
		75.76618085		17.0285142	330

$$\text{Log } Y = n \text{ Log } a$$

$$75.76618085 = 10 \text{ log } a$$

$$\text{log } a = 7.576618089$$

$$x \text{ log } Y = \text{log } b \cdot \sum x$$

$$17.0285142 = \text{log } b \cdot 330$$

$$\text{log } b = 0.051601558$$

Persamaan trend : $\text{Log } Y = \text{Log } a + x \text{ log } b$

$$\text{Log } Y = 7.576618085 + 0.051601558 x$$

Lampiran 5. Perhitungan Trend PDRB Kabupaten Jember Tahun 1992 -
2001

Tahun	Y	Log Y	x	X log Y	X ²
1992	1.569.413,468	6.195737375	-9	-55.76163638	81
1993	1.696.849,842	6.229643412	-7	-43.60750388	49
1994	1.838.604,18	6.264488243	-5	-31.32244122	25
1995	1.996.704,71	6.300313842	-3	-18.90094153	9
1996	2.170.699,24	6.336599654	-1	-6.336599654	1
1997	2.269.330,52	6.355897754	1	6.355897754	1
1998	2.097.376	6.321676294	3	18.96502888	9
1999	2.136.985,25	6.329801525	5	31.64900763	25
2000	2.208.057,36	6.344010351	7	44.40807246	49
2001	2.285.212,91	6.358926669	9	57.23034002	81
		63.03709508		2.67922408	330

$$\text{Log } Y = n \text{ Log } a$$

$$63.03709508 = 10 \text{ log } a$$

$$\text{log } a = 6.303709508$$

$$x \text{ log } Y = \text{log } b \cdot \sum x$$

$$2.67922408 = \text{log } b \cdot 330$$

$$\text{log } b = 0.0811886$$

$$\text{Persamaan trend : Log } Y = \text{Log } a + x \text{ log } b$$

$$\text{Log } Y = 6.303709508 + 0.0811886x$$